

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad F. 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021. Hal 31-32.
- Amrin, Kamal, Ardika. Et al., (2023). Implementasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Di Kabupaten Sumedang. Vol 8. No.1
- Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol 3. 67- 68
- Fadil, F. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal. Vol II. 254-256
- Firgiawan, AM. 2018. "Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi Komunikasi Pembangunan)".

- Fita, F. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Cilegon. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa : Serang).
- Halimah, M. and Karyana, A. (2017). Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 1(1), 74.
- Indarto,K. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Wisata “Warna-Warni” Jodipan Kota Malang Jawa Timur. Jurnal Dialektika Vol 2, No.1. Hal 95
- Kause, W. (2020). Pembuatan Keputusan musrenbang kecamatan di kabupaten timor tengah selatan. Flobamora, 2(2).
- Lisda,G. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Desa Tapada kecamatana Botumoito Kabupaten Doalemo. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume II Nomor 1.
- Mulyadi, Mohammad. 2009. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Modanggu, I. (2023). Peran partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan wilayah: studi kasus di desa butu kecamatan tilongkabila. jgs, 1(2), 79-84.

- Ndraha, Talizuduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, T. and Wardani, A. (2022). Efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa timusu kecamatan liliraja kabupaten soppeng. *Buletin Poltanesa*, 23(2).
- Nurdin, M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam musrembang di desa bulo kecamatan panca rijang kabupaten sidenreng rappang.
- Nurul I. 2024. Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan Minasa Te'ne Kecamatan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin : Makassar. Hal 2-3
- Purwaningsih, M. (2022). Pelaksanaan musrenbang daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif. *Jurnal Litbang Sukowati Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 151-164.
- Rachmawati, D., & Supriyadi, A. (2022). "Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang: Studi Kasus di Kelurahan X." *Jurnal Pembangunan Daerah*, 15(2), 123-135.
- Rahmadya, S. and Sugiri, D. (2022). Efektivitas musrenbangdes dalam penyusunan rkpd: studi kasus pada desa pagergunung kabupaten temanggung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 5(2), 53-59.

Ratri, V. (2021). Kelemahan pemerintah desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di desa tonrongge kecamatan baranti kabupaten sidenreng rappang.

Sari, R. (2023). "Tantangan dan Peluang Musrenbang di Era Digital." *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45-60.

Setiawan, A., & Prasetyo, H. (2023). "Evaluasi Implementasi Musrenbang di Tingkat Kelurahan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 201-215.

Syani, k. (2021). Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa carawali kecamatan wattang pulu kabupaten sidenreng rappang..

Undang-Undang dan Peraturan

Maros, badan P. P. D. K. (2022). *RKPD Kabupaten Maros Tahun 2022* (pp. 1–948)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). *Pedoman Musrenbang*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Musrenbang

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.